

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN CINA-ASEAN

Cina di masa Mao Zedong membangun hubungan dan kerjasama dengan negara lain dengan pemilihan partner sangat terbatas, Nikita Khrushchev selaku pengganti Stalin melancarkan politik de-stalinisasi, berakibat pada buruknya hubungan Cina dan Rusia, sedangkan Cina sangat tergantung pada Rusia, Mao Zedong yang sangat dekat dengan Stalin ini sebenarnya memutuskan untuk mencari pasar baru, namun karakter pemerintahan otokrat-totaliter dan tema komunis terlalu melekat di Cina menjadi batu ganjalan bagi Mao Zedong dalam mengembangkan pasarnya.

Deng Xiaoping selaku pengganti Mao Zedong, memiliki semangat reformasi yang sangat besar terkait di bidang politik dan ekonomi, salah satu nilai reformasi yang di lancarkan Deng Xiaoping adalah pembenahan hubungan Cina-ASEAN, dengan sikap Norma "ASEAN Way" nya ASEAN tetap konsisten untuk menjaga dan mengembangkan hubungan serta kerjasama dengan Cina dengan mempertimbangkan posisi strategis dan potensi pasar yang sangat besar, hal ini memungkinkan Cina memiliki tiga agenda sekaligus di ASEAN; dukungan ASEAN terkait Taiwan, kerjasama ekonomi, serta isu perbatasan di Laut Cina Selatan.

Puncak hubungan dan kerjasama ekonomi Cina-ASEAN tergambar dalam pertemuan ASEAN Regional forum pada tahun 1994, Dimana Cina juga hadir dan diterima di dalam forum tersebut membuka peluang bagi Cina-ASEAN untuk

membicarakan isu-isu keamanan secara formal dan bersifat langsung. Cina juga terlibat langsung dengan pertemuan selanjutnya, yaitu ASEAN+3 pada tahun 1997, pertemuan ini sangat penting bagi Cina untuk mempererat hubungan dan kerjasama dengan ASEAN. yang kemudian mengantarkan Cina ke Pertemuan Puncak ASEAN yang dihadiri seluruh Pemimpin Negara Anggota ASEAN pada tahun 2003. Dalam pertemuan akbar ini Cina-ASEAN menandatangani Kerangka Kesepakatan Kerjasama Ekonomi antara Cina dan ASEAN untuk persiapan Perjanjian Perdagangan Bebas Cina-ASEAN yang diharapkan terealisasi dalam kurun waktu 10 tahun.²⁴

Meskipun terbentuk kerjasama ekonomi antara Cina-ASEAN, hal ini tidak serta merta membuat Cina menjadi lunak terkait isu perbatasan Laut Cina Selatan, klaim Cina atas Laut Cina Selatan yang berbentuk "U" kerap menggunakan nada keras dan memaksa, sebelum kedatangan Amerika di Asia Tenggara Cina menjadikan isu Laut Cina Selatan menjadi "core national interestnya", namun sejak pendekatan Cina yang secara bilateral ini menjadi multilateral oleh ASEAN dan dengan intervensi Amerika, membuat Cina berpikir ulang untuk mempertahankan isu ini sebagai bagian dari "core national interest" nya.

A. Hubungan Cina-ASEAN di Masa Perang Dingin

Cina dan Asia Tenggara hubungannya banyak berubah sejak masa Cina di pimpin Deng Xiaoping, Deng Xiaoping yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1904 adalah

²⁴ Reuben Mondejar dan Wai Lung Chu, *ASEAN-China Relations: Legacies and Future Directions*, dalam Ho Khai Leong dan Samuel C.Y.Ku, op.cit., hal.218.

pemimpin politisi dan reformis Cina setelah kematian Mao Zedong yang memimpin negaranya menuju pasar ekonomi. Lahir di Guangan, Sichuan, Deng belajar dan bekerja di Perancis pada tahun 1920, kemudian dia terpengaruh doktrin Marxisme-Leninisme. Dia bergabung dengan Partai Komunis Cina pada tahun 1923. Sekembalinya ke Cina ia bekerja sebagai komisaris politik di daerah-daerah pedesaan dan dianggap sebagai "veteran revolusioner" dari Long March.²⁵

Mewarisi sebuah Negara yang penuh dengan kesengsaraan sosial dan kelembagaan yang dihasilkan dari Revolusi Kebudayaan dan gerakan politik massa lainnya dari era Mao, Deng menjadi inti dari "generasi kedua" kepemimpinan Cina pada saat itu. Dia dianggap "arsitek" dari pemikiran baru sosialis, setelah dikembangkan "Sosialisme dengan karakteristik Cina" dan memimpin reformasi ekonomi Cina melalui kebijakan yang dikenal sebagai "ekonomi pasar". Deng membuka Cina untuk investasi asing, pasar global dan persaingan terbatas swasta. Dia mengembangkan Cina menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia selama lebih dari 30 tahun dan meningkatkan standar hidup rakyat Cina.²⁶

Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu dari hampir seluruh kawasan di dunia yang terkena imbas dari pengaruh ideologi Perang Dingin. Kedekatan geografis kawasan Asia Tenggara dengan China ikut mempengaruhi kedekatan ideologis pula. Di samping itu perhatian yang diberikan Amerika Serikat (AS) pada negara-negara Asia Tenggara terkait dengan isu memerangi terorisme di kawasan atas adanya gerakan Islam

25 Cheng Li. *Cina's Leaders: The New Generation*, Maryland, Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2001, hal. 131.

26 Michael Y. M. Kau, Susan H. Marsh, *Cina in the Era of Deng Xiaoping: A Decade of Reform*, M.C sharpe ,Inc. 1993, hal. 179.

radikal membuat China tidak mau kalah dalam menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Akan tetapi hal tersebut dirasa wajar sebagai konsekuensi dari dinamika ekonomi China (Vaughn & Morrison, 2006). Akan tetapi negara-negara Asia Tenggara, melalui ASEAN berupaya untuk tidak berpihak pada keduanya, dan hal ini kemudian menjadi salah satu penyebab menurunnya hubungan ASEAN dengan China.

Semasa Perang Dingin, China hadir sebagai aktor baru yang sedang dalam mengembangkan ekonomi dan memperkuat militer, dan banyak menyebarkan pengaruh komunis di Asia Tenggara, yang dekat secara geografis. Dalam hal ini AS khawatir apabila China menjadi sebuah polar kekuatan baru dengan pertumbuhan ekonomi dan militernya yang dapat mengganggu tatanan dunia pada saat itu (Goh, 2007). Di samping itu Friedberg (1993) memandang bahwa berakhirnya Perang Dingin memunculkan dua kelompok scholar, yakni yang berpikiran optimis dan pesimis. Mereka yang optimis beranggapan bahwa kebangkitan ekonomi di China adalah bentuk cerminan dari bangkitnya negara-negara di Timur, sementara mereka yang pesimis beranggapan bahwa China akan menjadi kekuatan polar baru yang tidak stabil akibat terkena pengaruh dari runtuhnya Soviet (Friedberg, 1993).

China mulai mengintensifikasi hubungan dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara pasca Perang Dingin melalui banyak bentuk kerjasama utamanya dalam bidang ekonomi, dan pembentuka ASEAN + 3 (ASEAN, China, Jepang, Korea Selatan). Juga dalam bidang keamanan, China bergabung dalam Forum Regional ASEAN (ARF, ASEAN Regional Forum) yang didirikan pada tahun 1994 bersama dengan beberapa negara Pasifik lainnya. ARF memberikan kesempatan bagi para

Menteri Luar Negeri dari 17 negara kawasan Asia Pasifik dan perwakilan dari Uni Eropa (EU, European Union), untuk duduk bersama membicarakan masalah keamanan kawasan. Dalam hal ini China berusaha untuk mewujudkan *Security Policy Conference* dalam kerangka kerja ARF tersebut. Di mana dengan demikian China dapat menjadi salah satu posisi kunci yang penting dalam ARF. Kemudian pengklasifikasian ini akan memiliki fokus multilateral yang akan menawarkan alternatif arsitektur keamanan ASEAN yang selama ini secara tradisional telah didominasi oleh aliansi bilateral dengan AS (Vaughn & Morrison, 2006).

Dalam bidang sosial budaya, dibentuk pula Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC, ASEAN Sosio-Cultural Community) yang bertujuan untuk, “...*promote a people-oriented ASEAN in which all sectors or society are encouraged to participate in, and benefit from, the process of ASEAN integration and community building*” (Piagam ASEAN, pasal 1 ayat 13). Sementara itu dalam bidang ekonomi, peran penting China terhadap ASEAN dipengaruhi oleh masuknya imigran China ke wilayah Thailand dan Burma. Dalam hal ini terlihat bahwa terdapat pergeseran fundamental hubungan pada dari kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC, Asia Pacific Economic Cooperation) yang juga melibatkan AS, ke arah ASEAN *plus three*, yakni dengan China, Jepang, dan Korea Selatan, yang lebih menuju ke arah perdagangan bebas antara ASEAN dengan China.

Akan tetapi tidak berhenti pada pengembangan kerjasama ke arah yang lebih positif, China juga dipandang menjadi ancaman bagi negara-negara Asia Tenggara. Terlihat dari adanya dukungan China pada pemberontakan komunisme di masa lalu

serta konflik klaim teritori Laut China Selatan pada tahun 1990-an. Di mana China memiliki kepentingan dan berambisi untuk dapat menguasai Spratly Island dan diakui sebagai miliknya. Akan tetapi negara-negara ASEAN yang secara langsung berbatasan dengan Laut China Selatan seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam merasa terganggu akan hal ini. Konflik ini akhirnya menimbulkan bentrok angkatan laut antara Vietnam dan China pada tahun 1988 yang menewaskan 70 personil angkatan laut Vietnam. Jua pada tahun 1995 China berhasil merebut Mischief Reef yang juga diklaim oleh Filipina. Kemudian solusi yang muncul adalah dibuatnya sebuah peraturan (CoC, Code of Conduct) yang mengatur segala hal mengenai sengketa wilayah laut tersebut. Namun pada pembentukannya sendiri timbul perbedaan pendapat di antara sesama anggota ASEAN. Di satu sisi Filipina dan Vietnam menginginkan agar seluruh anggota ASEAN menyetujui sebuah konsep CoC untuk kemudian disodorkan dan dinegosiasikan dengan China. Sementara sebagian lain beranggapan perlu bagi ASEAN untuk melibatkan China dalam proses perumusan CoC sejak awal. Dari sini terlihat bahwa ASEAN masih memiliki permasalahan integritas yang cukup serius. Hingga akhirnya China mau bersikap lebih kooperatif, ketika ARF mulai campur tangan meski sangat terbatas. Pada tahun 2002 China setuju untuk menandatangani The Declaration on the Conduct of Parties in the South China. Dan akhirnya Vietnam dan China menegaskan kembali kedaulatan mereka atas kepulauan melalui pernyataan publik pada tahun 2004 (Vaughn & Morrison, 2006).

Selain itu pengaruh China dalam hal ekonomi yang mulai mendominasi ASEAN melalui dukungannya terhadap persebaran komunisme di kawasan Asia Tenggara juga dianggap sebagai ancaman. Meski kemudian pada akhirnya persepsi tersebut mulai berubah saat terjadi krisis finansial di Asia pada tahun 1997/1998, di mana China menolak untuk mendevaluasi mata uangnya sementara nilai mata uang negara-negara lain di Asia turun secara tajam. Kemudian di akhir 2004, China dan ASEAN secara bertahap sepakat untuk menghilangkan tarif dalam perdagangan dan mulai menciptakan area perdagangan bebas *—free trade area—*pada tahun 2010 dengan membentuk ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan negara-negara ASEAN dengan China saat ini telah mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik dibandingkan pada masa Perang Dingin. Terlihat dari kerjasama yang terjadi dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi adalah kerjasama melalui ACFTA. Dalam bidang keamanan melalui keterlibatan China dalam ARF. Penulis berpendapat bahwa dalam kerjasama ekonomi, China lebih banyak mengambil keuntungan daripada negara-negara ASEAN. Hal ini terlihat dari produk-produk China yang lebih banyak membanjiri pasaran. Dan hal ini justru menjadi tantangan bagi ASEAN untuk mencari strategi supaya tidak kalah oleh China, dan dapat mengambil keuntungan dari kerjasama tersebut.

Titik awal perubahan hubungan Cina dengan ASEAN (saat itu ASEAN masih berbentuk SEATO dan ASA) sebenarnya dimulai setelah Deng Xiaoping menggantikan kematian Mao Zedong untuk memimpin Cina, Sejak akhir dekade 70-an saat ASEAN

mulai terbentuk dan resistansi terhadap negara penganut komunisme tidak terlalu besar Cina mulai mendekati ASEAN dengan mengurangi dukungannya terhadap gerakan komunis di ASEAN dengan langkah pertama menutup Radio Rakyat Thailand di propinsi Yunan pada tahun 1979 dan menutup siaran radio komunis (Suara Demokrasi Malaya) pada tahun 1983²⁷. Langkah ini diyakini dapat membuka hubungan ASEAN dan sekaligus mengimbangi kebijakan Uni Soviet yang mendukung invasi Vietnam ke Kamboja.²⁸

Cina dengan perkembangannya dan menysikan Amerika dalam dominasi Asia membuat negara-negara di Asia Tenggara bereaksi, negara-negara di Asia Tenggara ini tidak serta merta melihat kebijakan Cina ini sebagai langkah yang tidak perlu di curigai, Sebagian dari mereka sudah melakukan langkah kebijakan untuk membentengi dirinya dengan bergabung dalam organisasi keamanan regional yang dibentuk dan dikendalikan oleh Amerika Serikat, Inggris dan Sekutunya seperti Colective Defence Treaty, SEATO, FPDA dan yang pada akhirnya ASEAN hingga terbentuknya ZOPFAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara. Cina berpandangan langkah yang diambil sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara ini tidak mendukung dalam usaha Cina untuk memperbaiki dan menjaga hubungan kerjasama.²⁹

Pada awalnya hal ini terjadi karena setelah Perang Dunia II, tidak lama setelah Filipna mendapatkan kemerdekaannya, Filipina melakukan Perjanjian Basis Militer (the Military Bases Agreements) dengan Amerika Serikat untuk kehadiran pasukan

²⁷N. Ganesan, "ASEAN's Relations with Major External Powers", *Contemporary Southeast Asia : A Journal of International & Strategic Affairs*, Vol.22, Issue 2, August 2000, hal. 8.

²⁸Bambang Cipto, *op.cit.*, hal. 170.

²⁹Bambang Cipto, *ibid*, hal. 169.

militernya di negara tersebut.³⁰ Pada tahun 1954 terbentuk organisasi regional keamanan yang di sebut *Collective Defence treaty for Southeast Asia* ditandatangani di Manila yang melibatkan lebih banyak negara di luar Asia Tenggara (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Selandia Baru, Pakistan, Thailand, dan Filipina).

ASEAN sendiri baru terbentuk saat pada tahun 1967 saat 5 menteri luar negeri masing-masing dari 5 negara; Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Menteri-menteri ini adalah: Adam Malik, Abdul Razak, Narciso Ramos, S Rajaratnam, dan Thanat Khoman, mereka berlima adalah pendiri dari ASEAN.

ASEAN terbentuk dari ketertarikan akan komunitas keamanan, ketakutan akan komunisme dan krisis kepercayaan dari kekuatan-kekuatan besar, maka dari itu mampu menjelaskan bila sebelumnya dibentuk juga Organisasi yang di sebut Southeast Asia Treaty Organization (SEATO).³¹

SEATO ini sangat berbeda dengan NATO karena lebih mengutamakan mekanisme konsultasi bagi para anggotanya, walau dalam pembentukannya di maksudkan sebagai NATO dari timur. Organisasi ini sebenarnya lebih merupakan upaya Amerika Serikat untuk membendung pengaruh komunis di kawasan Asia Tenggara, sedangkan organisasi yang dibentuk sepenuhnya oleh negara-negara Asia Tenggara untuk pertama kalinya adalah the Association of Southeast Asia (ASA) pada tahun 1961.

Pada tahun yang sama dengan dibentuk SEATO, Indonesia yang tidak termasuk kedalam anggota SEATO, menggalang kekuatan dalam Konferensi Bandung pada tahun

³⁰David Wurfel, *Filipino Politics: Development and Decay*, Ithaca and London: Cornell University Press, 1988

³¹Michael Leifer, *op.cit.*, hal. 9.

1955. Pada tahun 1971 disaat Thailand dan Filipina mulai mengembangkan politik luar negeri yang lebih mandiri, Malaysia dan Singapura masih terikat dengan perjanjian *Five Power Defence Arrangements* (FPDA) yang beranggotakan Malaysia, Singapura, Australia, Selandia Baru, dan Inggris, dimana perjanjian ini sebelumnya bernama Anglo MALAYSIA Defense Agreement (AMDA) yang bertujuan awal untuk menghadapi politik konfrontasi Indonesia. Tapi pada pertengahan 70-an akhirnya Inggris dan Australia menarik pasukannya dari Asia Tenggara.

ASEAN juga berusaha menguatkan posisi mereka sebagai organisasi regional dengan mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN). Pernyataan tentang netralitas ASEAN ini didasari pada keinginan negara-negara anggota, yang diprakarsai oleh Malaysia, untuk menjaga netralitas ASEAN dari campur tangan negara-negara luar. ZOPFAN juga didorong oleh keinginan kuat untuk meningkatkan otonominya sebagai organisasi regional yang mandiri dan tidak dikendalikan oleh kekuatan luar. Sekalipun kenyataannya bahwa beberapa negara anggota belum sepenuhnya dapat memisahkan diri dir kerjasama keamanan dengan negara lain karena alasan geografis dan sejarah.³²

Kunjungan Perdana Menteri Li Peng ke Thailand pada tahun 1988 yang menjelaskan kebijakan dasar Cina terhadap ASEAN adalah upaya untuk memperbaiki dan mengembangkan hubungan antara Cina – ASEAN. Pada tahun 1989, Cina membubarkan Partai Komunis Malaysia dan Partai Komunis Thailand secara resmi

³²Bambang Cipto, op.cit., hal. 43.

sebagai upaya untuk memperkuat keyakinan ASEAN terhadap kebijakan Cina untuk memperbaiki dan membuka hubungan dengan ASEAN. Indonesia menanggapi kebijakan ini dengan membuka kembali hubungan diplomatik dengan Cina pada Agustus 1990 dan kemudian diikuti oleh Singapura sebulan kemudian.³³

Pada Juli 1991 Menteri Luar Negeri Cina Qian Qichen menghadiri pembukaan ASEAN Ministerial Meeting ke 24. Momen itu di manfaatkan oleh Cina untuk menyampaikan niatnya bekerjasama dengan ASEAN yang ditanggapi positif oleh ASEAN dengan memberikan Cina status sebagai Mitra Konsultasi. Cina memanfaatkan kemajuan ini untuk meningkatkan hubungan dengan ASEAN yang berdampak dengan diberikannya Cina status penuh sebagai Mitra Dialog pada Juli 1996.³⁴

Setelah Cina menjadi Mitra Dialog dengan ASEAN, bukan berarti tidak ada masalah dalam hubungan itu. Indonesia yang pada saat itu masih memperlakukan alasan etnis dan teringat kudeta komunis pada tahun 1965 masih sulit menjalin hubungan dengan normal, sementara itu agresi militer Cina ke Vietnam pada tahun 1979 masih menyimpan rasa trauma pada bangsa Vietnam. Presepsi negative ini diperumit oleh pendudukan Cina atas kepulauan Paracel pada tahun 1974 dan yang nantinya berkonflik atas kepulauan Spratly pada tahun 1998 Serta isu kepulauan Mischief Reef antara Cina-Filipina yang menambah gelombang anti-Cinaisme semakin kuat. Karena alasan etnis pula, Malaysia dan Singapura tidak sekuat Negara ASEAN lainnya dalam menanggapi agresivitas Cina dalam kaitan isu klaim perbatasan wilayah. Bahkan Myanmar memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Cina dibanding Negara

³³Bambang Cipto, op.cit., hal. 171.

³⁴ Saw Swee-Hock, Sheng Lijun, Chin Kin Wah, *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005, hal. 1-2.

anggota ASEAN yang lain karena memiliki hubungan perdagangan dan akses Cina ke kawasan teluk Bengal.³⁵

B. Hubungan Cina-ASEAN Paska Perang Dingin

Untuk memahami hubungan Cina-ASEAN paska perang dingin dapat melalui dua pendekatan, yaitu; isu keamanan dan isu ekonomi. Selepas perang dingin, ketertarikan Amerika akan Asia tenggara sangat berkurang, ketakutan Amerika saat itu adalah munculnya “efek domino” komunisme di Asia Tenggara, saat itu dalam usahanya untuk menekan penyebaran komunisme di Asia, Amerika menjadikan Jepang sebagai jawara demokrasi di Asia, sedangkan untuk di wilayah Asia Tenggara, melihat perkembangan Vietnam, Amerika takut akan terjadinya “efek domino” sehingga Amerika menggaet ASEAN dengan cara memberikan bantuan bantuan pada negara yang yang berada dikawasan ini.

Di satu sisi negara-negara di Asia sendiri juga membentengi dirinya dengan membentuk SEATO, hingga akhirnya terbentuk ASEAN yang kemudian membentuk ZOPFAN,³⁶ namun menyusul runtuhnya Uni Soviet menghasilkan apa yang sudah ditempuh ASEAN menjadi “obsolete”, dan mengurangi “interest” mereka karena sudah tidak ada ancaman berarti lagi dari kekuatan asing yang nyata.³⁷ Namun hal ini berubah begitu focus Cina kembali ke Laut Cina Selatan.

³⁵N.Ganesan, op.cit., hal. 18.

³⁶Untuk mengetahui tentang SEATO dan ZOPFAN lihat di sub-bab “Hubungan Cina-ASEAN di Masa Perang Dingin”.

³⁷Tulus Warsito, op.cit., hal. 225.

Dengan absennya Amerika menyisakan Cina sebagai penguasa regional dengan kekuatan ekonomi dan militer terlampau jauh dari Negara Asia lainnya terutama di Asia Tenggara, hal ini mendorong Cina untuk memanfaatkan absennya Amerika dengan menghidupkan kembali isu Laut Cina Selatan dan menjadikan hal tersebut sebagai “national interest” nya.

Selama masa paska perang dingin isu Laut Cina Selatan menjadi topik terpanas di Asia berkaitan dengan pembahasan geopolitik maupun politik internasional, klaim Cina akan wilayah Laut Cina selatan yang berbentuk “U” awalnya di mulai Cina dengan bentuk hubungan bilateral agar Cina menang dalam diplomasi terkait dengan posisi Cina sebagai pihak terkuat di regional Asia, pendekatan bilateral Cina ini juga di maksudkan untuk mencegah Negara-negara di Asia Tenggara menentang klaim dan untuk mencegah intervensi Amerika.³⁸

Melihat arah ASEAN yang mulai solid Cina pun melakukan pendekatan lain, dengan tetap mempertahankan klaimnya atas Laut Cina Selatan, pada tahun 1992 Cina memberikan pernyataan bahwa: “Cina memandang Asia Tenggara sebagai teman dan partner, utamanya ASEAN”, ASEAN pun menyambut baik niat Cina dalam pembangunan kerjasama ekonomi, ASEAN melihat Cina adalah Negara besar dan potensial untuk di jadikan mitra ekonomi, akhirnya Cina bergabung dalam forum ASEAN, hal ini di mendorong Indonesia untuk mensosialisasikan “COC” (Code of Conduct) hanya saja saat itu Cina masih tidak mau mendiskusikan dan bernego apapun

³⁸Tran Truong Thuy, “Recent Developments in South China Sea: Implications for Regional Security, and Cooperation”, *CSIS*, 2006.

terkait perbatasan Laut Cina Selatan dan masih bertahan dengan klaim berbentuk “U” nya.³⁹

Cina sudah terlanjur masuk dalam forum ASEAN dan mendapatkan dirinya di cecar dengan banyak keluhan dari Negara-negara anggota ASEAN terkait isu perbatasan Laut Cina Selatan, akhirnya di prakarsai oleh Indonesia “COC” ini secara resmi di umumkan pada bulan Juli tahun 1996 saat Ministerial Meeting ASEAN yang ke 26, hingga saat itu Cina tetap masih belum mau menandatangani apapun, bahkan Cina memberikan nada-nada yang lebih keras dan mengancam dalam usahanya mengklaim Laut Cina Selatan, “COC” ini sendiri bertujuan agar semua Negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan agar mematuhi nilai-nilai dari “TAC” (Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia).⁴⁰

Reaksi Cina atas “COC” ini adalah dengan kembali kearah komunikasi bilateral, dan penggunaan nada-nada yang mengancam dan memaksa, namun seiring terjadi serangan terorisme 11 september pada tahun 2011, Amerika mengangkat isu terorisme menjadi isu global, kebetulan Amerika bekerjasama dengan Malaysia, Filipina dan Vietnam yang mana ketiga Negara tersebut bermasalah dengan Cina dalam isu perbatasan Laut Cina Selatan.

Melihat kehadiran Amerika, Cina bersuara dan meyakinkan Amerika bila membawa isu Laut Cina Selatan menjadi isu internasional hanya akan memperburuk keadaan. Kehadiran Amerika di Asia Tenggara membawa banyak analisis dan spekulasi di Cina sendiri, Cina yang sudah menjadikan isu Laut Cina Selatan sebagai “national

³⁹Ibid.

⁴⁰ Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Indonesia, 24 February 1976, www.aseansec.org/1217.htm

interest” nya tadinya ingin menjadikan isu ini menjadi level “core national interest”, namun memandang kehadiran Amerika Cina khawatir dengan menjadikan isu ini teramat penting bagi Cina hanya akan membuat Amerika memiliki alasan untuk mendatangkan kapal-kapal perangnya ke Asia.

Permasalahan Laut Cina Selatan yang akhirnya menarik perhatian Amerika ini, dengan nada keras yang selalu di keluarkan Cina dalam usahanya mengklaim Laut Cina Selatan menggeser pendekatan bilateralnya menjadi ‘bimultilateral’, awalnya Negara-negara di Asia Tenggara mulai solid dan menyuarakan tentang keinginan Cina yang terlalu berlebihan dan tanpa dasar dalam perhitungan klaimnya hingga akhirnya Amerika ikut andil dalam isu Laut Cina Selatan.⁴¹

Indonesia melihat kehadiran Amerika dapat dimanfaatkan untuk mendorong Cina agar menandatangani perjanjian “COC” ini, akhirnya pada tahun 2002 Cina dan ASEAN menandatangani perjanjian berdasarkan “COC” dan mendelakrasikannya menjadi “DOC” (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea), setelah terdelakrasikannya “DOC” memang Cina sempat tidak melakukan gerakan apapun setelah “DOC” namun pada tahun berikutnya Cina kembali mendesak beberapa Negara ASEAN untuk membahas perbatasan Laut Cina Selatan secara bilateral.

Cina yang terkesan tidak ‘kapok’ ini meneruskan usahanya untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan hingga Amerika benar-benar melakukan intervensi. Intervensi Amerika ini di takutkan oleh Cina karena mengganggu usaha Cina untuk menjadi pemimpin regional Asia, dan membuat ketergantungan Asia terutama Asia

⁴¹ Rodolfo C. Severino, “ASEAN and the South China Sea”, *Security Challenges*, Vol. 6, No. 2, 2010, hal. 37-47.

Tenggara pada Amerika semakin besar, tentunya Cina sendiri lah alasan kenapa Negara-negara di Asia Tenggara menggantungkan isu keamanannya pada Amerika, Cina menginginkan bahwasannya Cina di anggap sebagai teman, namun di satu sisi Cina mencapai keinginannya terkait klaim wilayah Laut Cina Selatan

Pada pertemuan menteri luar negeri ASEAN ke 43 di Hanoi para menteri-menteri luar negeri tersebut menyuarakan keluhannya akan Cina yang tidak mengikuti protokol “COC” yang sudah di setuju, menteri luar negeri Cina saat itu Yang Jiechi berkilah bahwasannya jangan membawa permasalahan ini menjadi isu multilateral antara Cina di satu sisi melawan ASEAN, Yang Jiechi mengatakan bahwa: “permasalahan Laut Cina Selatan ini adalah permasalahan bilateral dan kami berkonsentrasi agar permasalahan ini tidak menjadi multilateral atau sampai menjadi permasalahan internasional”.

Merespon dengan apa yang terjadi selama ini pada isu Laut Cina Selatan, Amerika menyatakan: “Amerika sangat mendukung proses diplomasi yang kolaboratif dan Amerika akan bersiap-siap untuk memfasilitasi hal ini”, Cina menangkap maksud dari Amerika ini dan berubah menjadi berhati-hati dalam usaha klaimnya, Cina merasa bahwa bila mereka memaksakan isu Laut Cina Selatan sesuai dengan keinginan Cina hal tersebut hanya akan memfasilitasi “Carrier” Amerika mendekati Cina.

Kedatangan Carrier Amerika ini sendiri pergerakannya tergantung dari seberapa besar isu yang berkembang, saat Taiwan ingin menyatakan kemerdekaannya Cina secara keras menentang hal itu dan berusaha menghalaunya dengan segala cara, Cina kerap mendemonstrasikan kekuatan lautnya terkait dengan isu Taiwan maupun

ASEAN, saat isu Taiwan Amerika membawa dua Carriernya; Nimitz dan Independence, tentunya Cina tidak ingin hal itu terulang, terlebih lagi Amerika akan menggabungkan agenda Laut Cina Selatan dan Taiwan, dan itu hanya akan membuat kemajuan Cina pada isu Taiwan mundur lagi, begitu juga dengan isu Laut Cina Selatan tentunya akan di jadikan isu internasional oleh Amerika.⁴²

⁴²Leszek Buszynski, "The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and U.S – China Strategic Rivalry, *CSIS*, 2012, hal. 144-146.